

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu (Budiardjo, 2009).

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan serta wewenang. Kekuasaan diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi atau dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya perumusan keinginan belaka.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi

banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan masyarakat. Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Di Indonesia terutama dikenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah bangsa.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2009 bangsa Indonesia telah melaksanakan sepuluh kali pemilihan umum. Semua pemilihan umum tersebut tidak dilaksanakan dalam keadaan yang *vacum*, melainkan berlangsung dalam keadaan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Pemilihan umum tahun 2004 untuk pertama kalinya Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, pada tahun 2004 juga diadakan pemilihan legislatif, sekaligus untuk memilih anggota DPD, sehingga setiap calon dituntut untuk memperkenalkan dirinya di hadapan masyarakat (Budiardjo, 2009).